



## ***Environmental Justice Advocacy* Oleh Gerakan Masyarakat Cinta Alam dalam Konflik Pembangunan Kereta Gantung Rinjani**

Lalu Ary Kurniawan Hardi<sup>1</sup>

Received 12 March 2023

Revised 21 June 2023

Accepted 17 July 2023

### **Abstrak**

GEMA ALAM muncul sebagai konfigurasi gerakan sosial baru yang memiliki domain tuntutan terkait keadilan lingkungan dalam konflik pembangunan kereta gantung rinjani, dimana keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi dua hal yang paling krusial didalamnya. Artikel ini ditulis melalui pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan metode pengumpulan data sekunder dan wawancara untuk menjawab dua pertanyaan mendasar terkait faktor pendorong keterlibatan GEMA ALAM dalam konflik ini dan strategi advokasi yang digunakan dalam menjawab berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Keterlibatan GEMA ALAM sendiri didorong oleh jati diri gerakan yang mereka miliki, serta berbagai fenomena lain yang mengindikasikan minimnya akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang partisipatif. Hal inilah yang mendorong GEMA ALAM melakukan berbagai strategi seperti edukasi, advokasi digital, membangun jejaring, serta *public hearing* untuk menjembatani terbentuknya kesepahaman antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aktor multisektoral. Upaya ini pula yang turut mendudukkan GEMA ALAM sebagai pihak penting yang berperan besar sebagai mediator lintas aktor, edukator masyarakat, agregator perspektif publik, dan katalisator tuntutan masyarakat dalam upaya resolusi konflik pembangunan Kereta Gantung Rinjani ini.

**Kata Kunci:** Gerakan Sosial Baru, Keadilan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Pengambilan Keputusan Partisipatif

### **Abstract**

*GEMA ALAM emerged as a configuration of new social movement that has a domain of demands related to environmental justice in the conflict of Rinjani cable car construction, where environmental sustainability and community welfare are the two most crucial things that were put in stakes. This article was written using a qualitative approach, using secondary data collection and interviews to answer two fundamental questions regarding the driving factors of GEMA ALAM's involvement in this conflict and the advocacy strategies used in responding to various problems that arise in society. The involvement of GEMA*

---

<sup>1</sup> M.A. Candidate in International Politics and Diplomacy, Faculty of Political Science and Security Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. Surel: [laluarykurniawanhardi@gmail.com](mailto:laluarykurniawanhardi@gmail.com)



*ALAM itself is driven by the identity of the movement that they have, as well as various other phenomena that indicate the lack of access for the community to be involved in participatory policy making. This is what drives GEMA ALAM to carry out various strategies such as education, digital advocacy, building networks, and public hearings to bridge the formation of understanding between communities, local governments, and multisectoral actors. This effort has also positioned GEMA ALAM as an important party that plays a major role as a cross-actor mediator, community educator, public perspective aggregator, and catalyst for community demands in conflict resolution efforts for the construction of the Rinjani Cable Car.*

**Keywords:** *New Social Movement, Environmental Justice, Sustainable Development, Participatory Decision Making*

## **Pendahuluan**

Agenda Pembangunan Kereta Gantung Rinjani pertama kali dicetuskan pada tahun 2016 oleh Bupati Lombok Tengah yang kala itu menjabat, Suhaili FT (DPM PTSP Nusa Tenggara Barat 2017). Agenda ini kemudian sontak menuai penolakan keras dari masyarakat yang khawatir bahwa pembangunan kereta gantung tersebut tidak lebih dari sekadar upaya untuk memprivatisasi ruang-ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat lingkaran Rinjani (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2020). Penolakan keras dari masyarakat tersebut kemudian ditanggapi dengan suara serupa oleh M. Zainul Majdi atau yang lebih kita kenal dengan panggilan akrab Tuan Guru Bajang, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang saat itu masih menjabat (Liputan6.com 2017). Pihaknya kemudian dengan tegas menolak pengajuan izin pembangunan tersebut sebab wewenang pengelolaan wilayah yang rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan kereta gantung tersebut, merupakan wewenang yang dipegang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DISLHK Nusa Tenggara Barat 2023). Lebih jauh, penolakan luas terhadap agenda ini juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan preservasi alam dan perekonomian rakyat yang dikhawatirkan akan sangat terdampak akibat pembangunan Kereta Gantung Rinjani (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2020).

Selang 4 tahun mengalami mati suri, agenda pembangunan kereta gantung ini secara tiba-tiba kembali muncul ke permukaan pada akhir tahun 2019 yang lalu, menyusul adanya gelaran MotoGP 2021 yang akan diadakan di Sirkuit Mandalika,



Lombok Tengah (Biro Adpim Nusa Tenggara Barat 2022). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui berbagai pernyataan resmi yang disampaikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah yang kini menjabat, yaitu Zulkieflimansyah dan Lalu Gita Aryadi, bahkan menegaskan bahwa pihak pemprov telah menerima investasi awal dari pihak pemodal dan memastikan bahwa pembangunan dapat terealisasi tanpa hambatan (DPM PTSP Nusa Tenggara Barat 2023). Pernyataan publik yang disampaikan oleh keduanya kemudian turut memancing eskalasi polemik yang cukup panas dikalangan masyarakat lingkaran Rinjani, para pecinta lingkungan, dan pelaku usaha pariwisata alam. Dari berbagai pendapat yang menyeruak ke permukaan, kekecewaan terbesar yang disuarakan oleh masyarakat utamanya mengarah pada minimnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah sebelum menyetujui pemberian izin prinsip kepada perusahaan pengembang (GEMA ALAM 2020).

Sekalipun izin prinsip dalam hal ini hanyalah merupakan izin awal untuk meninjau lahan dan melakukan studi lebih jauh, serta secara spesifik dapat dikatakan belum masuk kedalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat tetap merasa bahwa agenda ini terlalu terburu-buru dan kurang mempertimbangkan banyak aspek yang sejatinya harus ditelaah terlebih dahulu (GEMA ALAM 2020). Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, berpendapat bahwa masyarakat dan para pemerhati lingkungan tidak perlu khawatir akan dampak pembangunan kereta gantung ini (Biro Adpim Nusa Tenggara Barat 2022). Lebih jauh, ditegaskan bahwa *construction site* yang dipilih oleh pihak pengembang tidaklah terletak di wilayah konservasi atau taman nasional, melainkan di wilayah yang dimungkinkan untuk dikelola secara sinergis dan akan mampu menjadi peluang investasi besar bagi Nusa Tenggara Barat (Biro Adpim Nusa Tenggara Barat 2022). Pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mendampingi pihak perusahaan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang hingga pembangunan wahana terkait (Biro Adpim Nusa Tenggara Barat 2022).

Pernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur NTB tersebut lantas kembali menyulut reaksi keras dari masyarakat dan pemerhati lingkungan yang menganggap bahwa pihak pemerintah daerah terlalu memandang remeh eksistensi dari kawasan



hutan lindung yang sama pentingnya dengan kawasan konservasi. Selain itu, masyarakat yang notabene menolak agenda tersebut juga cukup kecewa dengan sikap pemerintah yang sama sekali tidak pernah mencoba untuk melakukan kiat-kiat persuasif untuk meyakinkan atau bahkan melibatkan masyarakat dalam tahapan demi tahapan dari agenda pembangunan ini (GEMA ALAM 2020). Santerinya perselisihan pemahaman antara banyak pihak kemudian menggerakkan sebuah organisasi gerakan sosial bernama GEMA ALAM atau Gerakan Masyarakat Cinta Alam untuk mengambil peran guna mengadvokasi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan alam yang menjadi dua domain pembahasan utama dari pro-kontra pembangunan kereta gantung ini.

GEMA ALAM sendiri merupakan sebuah organisasi gerakan sosial yang memiliki fokus isu dalam hal pemenuhan, penegakan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta penegakan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, konservasi, dan preservasi dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun potensi lingkungan hidup. Apabila ditelisik lebih dekat, konfigurasi gerakan yang diaktualisasikan oleh GEMA ALAM ini sendiri sedikit banyak sangat sesuai dengan karakteristik dari gerakan sosial keadilan lingkungan (*environmental justice social movement*). Secara konseptual, gerakan sosial keadilan lingkungan dapat dipahami sebagai konfigurasi gerakan sosial baru yang mengusung tuntutan mengenai hak asasi manusia dan preservasi lingkungan sebagai dua tuntutan yang holistik dan interrelasional (Schlosberg 2007:5).

Dalam kajian-kajian terdahulu, studi mengenai gerakan sosial keadilan lingkungan lebih dominan membahas fenomena penolakan dan upaya untuk mewujudkan redistribusi beban maupun keuntungan yang setara dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu fenomena yang dikaji oleh Allen et al. (2007:108). misalnya, menjabarkan lebih jauh mengenai lahirnya gerakan sosial keadilan lingkungan yang diinduksi oleh maraknya tindakan diskriminasi lingkungan terhadap masyarakat non-kulit putih (*people of colour*) dan masyarakat miskin di wilayah pinggiran kota di berbagai negara bagian, di Amerika Serikat pada tahun 1960-an hingga tahun 2000-an (Allen et al. 2007:108). Selebihnya, berbagai kajian lain juga memiliki pola pembahasan serupa, namun memiliki skop wilayah kajian yang lebih luas menyusul diadopsinya agenda mengenai perwujudan keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan



sebagai salah satu agenda global dan memiliki gerakan sosial pengusung yang telah tersebar di berbagai negara di dunia (Roberts 2007:290-295).

Kendati demikian, kajian mengenai gerakan keadilan lingkungan di Indonesia masih cukup minim. Berbagai studi yang membahas tentang gerakan sosial pro-lingkungan di Indonesia umumnya masih lebih berfokus dalam pembahasan mengenai tuntutan gerakan yang partikular terhadap lingkungan saja dan belum secara mendalam menarik korelasi yang jelas antara preservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat layaknya yang menjadi aksen khas dari kajian-kajian keadilan lingkungan atau *environmental justice*. Dengan demikian, tulisan ini akan mencoba untuk membahas lebih dalam mengenai dua hal mendasar, yaitu: (a) keterlibatan GEMA ALAM sebagai sebuah organisasi gerakan sosial dalam mewujudkan keadilan lingkungan pada konflik pembangunan kereta gantung rinjani; (b) repertoar gerakan yang digunakan dalam upaya advokasi masyarakat. Melalui kontekstualisasi yang dijabarkan pada tulisan ini, diharapkan dapat diperoleh suatu pemahaman yang baru terkait dengan gerakan sosial keadilan lingkungan yang dimotori oleh GEMA ALAM. Penjabaran tersebut kemudian juga diharapkan dapat menjadi tinjauan pertama untuk menilik keterlibatan suatu gerakan sosial, khususnya GEMA ALAM, dalam mencuatnya polemik yang telah lama berkembang di Nusa Tenggara Barat ini.

## Metode

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif sendiri dipilih untuk mengkaji peran strategis dari GEMA ALAM dalam polemik pembangunan kereta gantung Rinjani atas pertimbangan kemampuan metode ini untuk memotret berbagai realita serta fakta yang ada di lapangan secara komprehensif. Kemudian, apabila dikaitkan dengan fokus penelitian yang dimaksudkan untuk menilik dampak pergerakan yang dimiliki GEMA ALAM terhadap pengambilan keputusan dalam polemik pembangunan kereta gantung di wilayah lingkaran Rinjani, metode ini juga memiliki keunggulan lebih besar dibandingkan dengan metode kuantitatif karena memungkinkan peneliti untuk menyingkap berbagai realita yang tidak dapat dikuantifikasikan kedalam bentuk data numerik semata, seperti misalnya bagaimana pengaruh GEMA ALAM dalam proses pembangunan kereta gantung Rinjani yang



digambarkan melalui respon yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai otoritas utama dalam proses pembangunan ini. Di sisi lain, metode yang dipilih sebagai mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data campuran (*mixed data-collecting method*) yang memadukan pengumpulan data berbasis riset lapangan (*field research*) berupa wawancara mendalam atau *indepth interview*, serta riset pustaka (*library research*) berupa kajian literatur atau *literature review*.

Kedua metode pengumpulan data ini digunakan atas pertimbangan kemampuan metode-metode tersebut dalam memberikan aksesibilitas yang luas bagi subjek penelitian untuk memberikan data yang diperlukan guna menjawab persoalan utama dalam penelitian ini. Selain itu, metode ini juga memiliki kelebihan yang memungkinkan peneliti untuk mengakses data ditengah kondisi pandemi yang sedikit banyak membatasi mobilitas peneliti untuk mengunjungi berbagai instansi terkait. Hal ini menjadi sangat krusial, sebab polemik pembangunan kereta gantung di wilayah lingkaran Rinjani masih berlangsung hingga kini, dimana ini berarti bahwa berbagai proses negosiasi antara GEMA ALAM dengan pemerintah, manuver-manuver pergerakan, serta tuntutan dari masyarakat masih terus bergulir (GEMA ALAM 2020). Dengan demikian, dibutuhkan suatu mekanisme pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menjangkau seluruh pihak yang terkait dengan polemik ini utamanya GEMA ALAM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas pertimbangan tersebut, metode ini kemudian dianggap sebagai metode pengumpulan data yang tepat untuk menjawab persoalan yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam prosedur penelitian ini adalah teknik analisis data dengan model analisis isi substantif. Teknik ini sendiri merupakan salah satu varian teknik yang cukup lazim digunakan dalam penelitian atau kajian ilmiah yang secara metodologis bersifat kualitatif. Proses analisis ini sendiri dimaksudkan guna menyederhanakan pihak-pihak atau aktor politik yang ada di lapangan serta memperoleh gambaran peristiwa yang holistik dan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Harrison 2007:132-133). Melalui teknik analisis ini, berbagai data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara, penjabaran mengenai hasil pengamatan langsung atau observasi, serta data-data sekunder lain berupa



dokumen-dokumen resmi, publikasi, hasil-hasil kajian, maupun data-data yang diperoleh dari instansi terkait akan dielaborasi serta disederhanakan melalui konsep dan teori yang tersedia. Teknik analisis ini akan menunjang proses penyaringan berbagai data deskriptif yang tergolong sangat luas dan general. Melalui literatur penunjang yang ada, data kemudian akan dioperasionalisasikan sehingga peneliti dapat melakukan interpretasi yang mendasar sebelum pada akhirnya data tersebut akan dibahas serta diekstraksi menjadi gagasan-gagasan kesimpulan yang secara koheren menjawab berbagai pertanyaan dari penelitian ini.

Terdapat beberapa unsur yang dibidik sebagai subjek atau partisipan dalam penelitian ini, unsur-unsur tersebut adalah: (1) Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (2) Unsur Dewan Pelaksana Harian (DPH) *UNESCO Global Geopark Rinjani Lombok*; (3) Unsur GEMA ALAM seperti para aktivis yang tergabung didalamnya, para relawan, pengurus, serta anggota dari GEMA ALAM; (4) Unsur masyarakat yang tinggal di wilayah pembangunan kereta gantung seperti tokoh masyarakat ataupun otoritas desa setempat. Perlu dipahami bahwa data yang akan berusaha diperoleh dari keempat narasumber tersebut akan dikumpulkan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan metode pengumpulan data dari penelitian ini yang bersifat campuran dan fokus penelitian yang lebih menitikberatkan perhatian pada diskursus yang terjadi antara GEMA ALAM dengan pihak Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan *leading actor* dalam agenda pembangunan ini. Maka dari itu, khusus untuk pihak GEMA ALAM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian data dari subjek penelitian lain akan dikumpulkan melalui metode kajian literatur.

## **Kajian Literatur**

Secara teoritis GEMA ALAM dapat digolongkan sebagai sebuah bentuk konfigurasi gerakan sosial baru (*new social movement*). Penggolongan ini sendiri tidak terlepas dari



karakterisasi GEMA ALAM yang sangat identik dengan model-model pergerakan gerakan sosial baru. Apabila mengacu pada pendapat Enrique Larana, Hank Johnston, dan Joseph R. Gusfield dalam karyanya yang berjudul “*New Social Movements: From Ideology to Identity*” (1994:4-9) karakter yang dimiliki oleh model gerakan ini umumnya adalah: (1) memiliki struktur gerakan yang otonom dan terdesentralisir serta telah meninggalkan bentuk struktur yang hirarkial dan kaku layaknya pada gerakan sosial klasik; (2) memiliki ideologi yang bertumpu pada prinsip *self-reflectionist* atau pengaktualisasian atribut dan jati diri; (3) menerapkan strategi pergerakan yang sifatnya non-koersif dan mengedepankan pendekatan yang lebih bersifat persuasif, negosiatif, dan diskursif; (4) memiliki tuntutan yang bersifat *post-materialist* atau melampaui hal-hal yang sifatnya materialistik; (5) berorientasi terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dalam berbagai aspek, serta; (6) memanfaatkan simbol sebagai identitas gerakan.

Lebih jauh, apabila ditinjau dari perspektif teori berorientasi identitas, gerakan sosial baru yang sejatinya dapat kita maknai sebagai suatu konfigurasi atau bentuk pembaharuan dari model-model gerakan sosial klasik dan neo-klasik dalam hal orientasi, strategi, ideologi, dan tuntutan gerakan ini kemudian dapat lahir dan terbentuk akibat adanya beberapa proses fusi yang melibatkan individu-individu dengan identifikasi diri yang serupa. Mengacu pada pendapat Hunt dan Bentford (dalam Sukmana 2016:148) suatu gerakan sosial baru dapat lahir akibat terbentuknya identitas kolektif yang terbangun melalui tiga proses inti yaitu: (1) pembentukan identitas bersama yang diawali dengan identifikasi jati diri dan aktualisasi atribut personal dari orang-orang yang memiliki identitas serupa; (2) pembentukan basis solidaritas untuk memupuk *sense of belonging* dan kohesivitas kelompok dengan orang-orang yang memiliki identitas serupa tersebut, dan; (3) pembentukan komitmen untuk memperjuangkan tuntutan dan tujuan bersama dalam bentuk komitmen afektif, komitmen kontinuitas, dan komitmen normatif.

Dalam kontekstualisasi GEMA ALAM, hal ini dapat dilihat secara jelas dari klaim mereka terhadap jati diri gerakan yang mereka sebut sebagai “bagian integral dari masyarakat”. Klaim tersebut dapat kita maknai bahwa terbentuknya GEMA ALAM sebagai sebuah konfigurasi gerakan sosial tidak terlepas dari kerangka filosofis dimana orang-orang yang tergabung dan membentuk gerakan ini sejatinya memiliki identifikasi





diri yang sama, yaitu sama-sama merupakan pihak yang ingin memperjuangkan kelangsungan hidup masyarakat. Di sisi lain, fokus isu yang dimiliki oleh GEMA ALAM yang berada pada dua domain besar, yaitu penegakan terhadap hak-hak asasi manusia dan preservasi lingkungan juga sudah cukup jelas menggambarkan bahwa organisasi ini dapat digolongkan sebagai organisasi gerakan sosial baru. Pada karakterisasi yang lainnya, seperti strategi dan struktur gerakan, GEMA ALAM juga turut menunjukkan karakterisasi yang sesuai dengan konfigurasi gerakan sosial baru karena lebih mengedepankan strategi yang sifatnya persuasif dan non-koersif melalui jalur-jalur diskusi maupun kajian-kajian strategis, serta struktur organisasi yang non-hirarkial dan lebih bersifat fungsional.

Di sisi lain, fokus gerakan GEMA ALAM yang memadukan tuntutan untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia serta preservasi lingkungan sebagai satu tuntutan yang utuh dan saling terkait satu sama lain ini juga mengindikasikan bentuk gerakan sosial baru yang berorientasi terhadap keadilan lingkungan (*environmental justice social movement*). Menurut Schlosberg (2007:5-9) keadilan lingkungan atau *environmental justice* merupakan konfigurasi gerakan sosial kontemporer yang menekankan tuntutannya pada upaya pelestarian lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Tidak seperti gerakan sosial pro-lingkungan pada umumnya, para aktivis gerakan sosial keadilan lingkungan percaya bahwa preservasi lingkungan hanya dapat dilakukan dengan turut mempertimbangkan aspek kesejahteraan dari masyarakat dan begitupula sebaliknya (Sandler dan Pezzulo 2007:321-323). Keyakinan dari *environmental justice activist* inilah yang tidak diakomodasi oleh para *environemntalist*, sebab mereka dinilai hanya mengedepankan preservasi lingkungan sebagai agenda tunggal yang menyebabkan perjuangan untuk menyelamatkan lingkungan dapat saja menjadi bias dan malah melanggengkan diskriminasi terhadap orang-orang yang dimarginalkan eksistensinya dalam proses pengambilan keputusan (Allen et al. 2007:108-109). Ini pula yang melatarbelakangi para aktivis keadilan lingkungan menyebut bahwa para *environmentalist* yang juga dijuluki sebagai *the tree hugger* atau pemeluk pohon, belum tentu mampu memeluk sesama manusia (Allen et al. 2007:108-109).



Lebih jauh, massifikasi dari peran gerakan sosial keadilan lingkungan sendiri sejatinya dilatarbelakangi oleh menguatnya upaya advokasi *people of colour* atau orang-orang non-kulit putih dan masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di wilayah *sub urban* di negara-negara bagian di Amerika Serikat pada awal 1960-an yang menjadi subjek dari diskriminasi lingkungan (Allen et al. 2007:113). Kontekstualisasi dari gerakan keadilan lingkungan inilah yang kemudian terpancar dengan sangat jelas pada pergerakan GEMA ALAM sejak organisasi gerakan sosial ini berdiri pada 15 Agustus 2004 yang lalu. Setelah sekitar 16 tahun lamanya berdiri, GEMA ALAM telah terlibat aktif dalam berbagai upaya advokasi dan resolusi konflik, sosialisasi, pengorganisasian masyarakat dan *community outreach*, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pemanfaatan potensi alam, pemberdayaan perempuan, penyaluran bantuan dan kesukarelawanan, serta lain sebagainya.

Pergerakan yang telah diaktualisasikan oleh GEMA ALAM selama ini menunjukkan dengan gamblang bahwa usaha perwujudan kesejateraan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dari potensi sumber daya alam yang seringkali dijadikan narasi pemulus agenda pembangunan, hanya akan terwujud apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesetaraan, keadilan, inklusivitas, dan kelestarian dapat dilaksanakan secara sinergis. Melalui idealisme pergerakan ini pula, GEMA ALAM juga telah berhasil mendorong terbentuknya siklus perumusan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan mampu merangkul seluruh pihak untuk turut serta dalam menyuarakan pendapat mereka sebagai bagian dari upaya aktualisasi determinasi diri (*self-determination*) yang juga adalah hak dari setiap individu.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor Pembentukan Konfigurasi Gerakan dan Keterlibatan dalam Konflik**

Keterlibatan dari GEMA ALAM dalam upaya advokasi masyarakat lingkaran Rinjani pada polemik ini didasari oleh dua penyebab yang dapat digolongkan sebagai penyebab yang bersifat filosofis serta penyebab yang bersifat praktis. Alasan filosofis dari keterlibatan GEMA ALAM dalam upaya advokasi kepentingan masyarakat dalam polemik ini tidak



terlepas dari jati diri gerakan yang mereka miliki. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, GEMA ALAM memiliki identifikasi jati diri yang mereka sebut sebagai “bagian integral dari masyarakat”. Hal ini berarti terdapat dua konsekuensi logis yang mungkin timbul dari klaim jati diri tersebut, yaitu konsekuensi yang bersifat komunal dan sakral. Dalam pemahaman mengenai konsekuensi komunalitas GEMA ALAM, jati diri mereka sebagai sebuah gerakan sosial yang menyatu dengan masyarakat dapat diibaratkan sebagai keseluruhan sistem organ pada tubuh, dimana ketika ada satu organ yang merasakan sakit maka akan ada organ-organ lain yang akan merespon rasa sakit tersebut.

Dalam kasus advokasi GEMA ALAM pada polemik pembangunan Kereta Gantung Rinjani, keterlibatan GEMA ALAM tidak terlepas dari bagaimana mereka turut merasakan secara langsung dampak yang timbul serta keresahan yang menguat ditengah komunitas lingkaran Rinjani. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk kemudian berpartisipasi secara aktif dalam membantu masyarakat lingkaran Rinjani untuk menyuarakan apa yang menjadi kekhawatiran mereka dalam agenda pembangunan Kereta Gantung Rinjani ini. Tidak cukup sampai disitu, klaim sebagai “bagian integral dari masyarakat” ini juga memiliki konsekuensi sakral yang berkaitan dengan internalisasi nilai dan budaya yang juga turut mendorong GEMA ALAM untuk memelihara Rinjani sebagai suatu tempat yang disakralkan dan tidak dapat secara sembarangan dieksploitasi guna kepentingan segelintir pihak saja.

Klaim GEMA ALAM yang menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat mengisyaratkan bahwa para aktivis dan penggerak yang tergabung dalam GEMA ALAM juga mengalami proses internalisasi nilai dan keyakinan yang serupa dengan masyarakat, dimana salah satu nilai dan keyakinan terkait dengan eksistensi Rinjani adalah kepercayaan bahwa Rinjani merupakan *inen paer* dari Pulau Lombok (Syarifudin et al. 2011:61). Istilah ini sendiri berarti “ibu bumi” atau juga dapat dimaknai sebagai pusat kehidupan. Nilai dan keyakinan yang diinternalisasikan ini pula yang kemudian menjadikan GEMA ALAM tidak hanya memandang Rinjani sebagai cagar biosfer dunia, tetapi juga suatu tempat yang sakral dan harus dijauhkan dari aktivitas yang melanggar sistem norma, nilai, etika yang dipelihara oleh masyarakat sekitar, dan



kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan dari Rinjani itu sendiri (Syarifudin et al. 2011:61).

Berdasarkan dua konsekuensi logis yang timbul dari klaim jati diri gerakan GEMA ALAM, dapat kita pahami bahwa konfigurasi pergerakan dari gerakan sosial baru nyatanya tidak hanya dapat didorong oleh penyebab-penyebab yang sifatnya *tengible* dan praktis semata, tetapi juga terdapat unsur prinsipil dan filosofis yang sejatinya mampu menginduksi lahirnya suatu konfigurasi gerakan sosial baru itu sendiri. Bukti alasan filosofis berupa klaim jati diri yang menggerakkan GEMA ALAM untuk terlibat dalam advokasi masyarakat ini juga membuktikan bahwa teori berorientasi identitas yang membahas tentang pentingnya identifikasi dan determinasi jati diri menjadi cukup relevan dengan pembahasan ini.

Selanjutnya, selain didorong oleh alasan yang bersifat filosofis, keterlibatan GEMA ALAM dalam upaya advokasi masyarakat dan lingkungan pada konflik ini juga disebabkan oleh adanya penyebab-penyebab *tengible* atau alasan praktis yang telah lama menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Fenomena pendorong keterlibatan GEMA ALAM yang bersifat *tengible* tersebut *pertama* ialah temuan GEMA ALAM yang mengindikasikan minimnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dan perusahaan dengan masyarakat lingkaran Rinjani yang kemudian menjadikan pengambilan kebijakan pembangunan ini dinilai sangat non-partisipatif dan memiliki alur yang tidak transparan. Hal ini diutarakan oleh Haiziah Gazali, selaku Ketua GEMA ALAM pada wawancara yang dilakukan dengan peneliti via *platform* pertemuan daring *G-Meet*:

“...pemerintah membiarkan isu ini bergulir terus begitu saja tanpa ada komunikasi apa-apa dengan masyarakat. Dan faktanya juga masyarakat tahu tentang hal ini dari media massa bukan dari pemerintah langsung. Ya wajar kemudian masyarakat jadi kecewa karena pemerintah seakan-akan tidak menganggap masyarakat itu ada, padahal masyarakat juga punya hak untuk di dengar, punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka khawatirkan. Seandainya pemerintah dan perusahaan memang dari awal langsung terbuka kepada masyarakat, menjabarkan siapa-siapa saja pihak yang terlibat, ya pasti ada celah untuk negosiasi.....Hal ini yang menurut kami, GEMA ALAM, harus diluruskan. Inilah yang jadi dasar bagi kami untuk terlibat, bagaimana kita memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang status (pembangunan) nya



sekarang seperti apa.” (Wawancara pada Tanggal 27 November 2020 Via *Google Meeting*)

Hal ini dirasa oleh masyarakat lingkaran Rinjani cukup mengecewakan, sebab tidak terdapat sama sekali ruang diskursif yang dibuka oleh pemerintah daerah bagi mereka guna berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan pendapat. GEMA ALAM juga menilai pembangunan yang non-partisipatif ini sebagai sesuatu yang harus dijawab dan segera dituntaskan oleh pemerintah daerah, sebab masyarakat sebagai subjek kebijakan sudah seharusnya didengar dan dimintai pertimbangan sedari awal.

Kemudian *kedua*, adanya risiko terganggunya keseimbangan ekosistem asli di wilayah pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana yang bersifat *human-caused disaster* seperti banjir, tanah longor, kekeringan, maupun merusak keberlangsungan ruang-ruang dan sumber kehidupan masyarakat sekitar, mengacaukan bentang alam asli, serta mengganggu siklus hidup flora dan fauna yang mendiami atau sekadar melewati wilayah tersebut sebagai jalur migrasi. Hal tersebut turut diutarakan oleh Diar Ruly Juniari, aktivis sekaligus Badan Pengurus Harian GEMA ALAM:

“Perlu diingat kalau pembangunannya besok di hutan lindung, dan panjang dari kereta ini sendiri kan di perkirakan 10-12 km atau yang terpanjang di dunia. Ya meskipun hutan lindung tidak termasuk wilayah konservasi dan terdapat area pemanfaatan di dalamnya, tetap saja pembangunan ini mengganggu ekosistem asli disana. Apalagi disekitar wilayah pembangunan banyak sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat bahkan masyarakat di Pulau Lombok. Bagaimana kalau pembangunan ini mempengaruhi sumber-sumber kehidupan dan ruang-ruang hidup tersebut. Belum lagi kalau kita berbicara tentang flora dan faunanya. Sepersekian hektare yang dibuka makan ada sekian banyak juga populasi hewan atau tumbuhan yang nanti keseimbangannya terganggu.” (Wawancara pada Tanggal 13 November 2020 Via *Google Meeting*)

*Ketiga*, munculnya dampak ekonomi yang merugikan masyarakat lingkaran Rinjani yang notabene menggantungkan hidupnya pada sektor informal seperti porter atau pramubarang bagi pendaki, penyedia rumah singgah, pedagang kaki lima, penjual souvenir, rumah makan, dan penyedia kebutuhan pendakian lainnya. Selain berpotensi mengganggu siklus perekonomian lokal, pembangunan kereta gantung ini juga oleh GEMA ALAM diproyeksikan akan gagal membawa *trickle-down effect* yang diharapkan oleh



pemerintah daerah akan terjadi melalui pemberian keleluasaan bagi masuknya investasi, serta malah melanggengkan kesejangan apabila dalam aspek operasionalnya minim melibatkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Juaini pada wawancara dengan peneliti, pihaknya menegaskan bahwa:

“...selama ini porter orang yang pertama digunakan jasanya. Orang yang pertama dihubungi oleh wisatawan dari Jakarta atau Bali yang mau melawat ke Lombok dan menikmati alam Rinjani. Dengan kereta gantung ini, porter akan menjadi opsi kedua artinya sudah tidak mulai dilirik atau bahkan tidak sama sekali lagi diminati.” (Wawancara pada Tanggal 13 November 2020 Via *Google Meeting*).

Merespon hal ini Diar Ruli Juniari mengungkapkan bahwa hal-hal seperti ini ada baiknya dipertimbangkan lebih dalam, sebab perekonomian masyarakat lingkaran Rinjani yang bergerak dalam sektor jasa dan ekonomi mikro sudah cukup terpukul selama 2 tahun terakhir, lebih jauh pihaknya mengungkapkan:

“Jika memang rencananya seperti itu, pemerintah harusnya tanya dulu ke masyarakat, masyarakat mau gak? Mau gak bayar sewa semisal di relokasi ke suatu tempat. Kalo sekarang mereka bisa berjualan di sekitar lahan mereka lalu di relokasi kemana, itu mereka harus ada *consent*. Apalagi dua tahun ini masyarakat sudah kehilangan pendapatan yang sangat besar mulai dari gempa beruntun di Lombok tahun 2018 kemarin, (sampai) COVID-19 tahun ini. kalau 2021 sektor ekonomi kerakyatan juga disisihkan maka kita tidak tahu sebesar apa kerugian yang harus ditanggung masyarakat lingkaran Rinjani” (Wawancara pada Tanggal 13 November 2020 Via *Google Meeting*).

Selanjutnya yang *keempat*, pembangunan ini dinilai oleh pihak GEMA ALAM sebagai pembangunan yang tidak peka terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan lingkaran Rinjani dan terkesan memarginalisasi kaum perempuan. Aspek kepekaan terhadap kebutuhan perempuan dalam agenda pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Rinjani menjadi pertimbangan krusial sekaligus fokus khusus bagi GEMA ALAM, sebab berdasarkan kajian yang dilakukan oleh organisasi ini, hampir sebagian besar para pekerja informal yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata Rinjani adalah perempuan. Muhammad Juaini dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa:



“.....perempuan semacam dijadikan konsideran yang paling minim untuk dipertimbangkan eksistensinya.... Biasanya pembangunan berjalan dulu baru mikir ibu-ibu bagaimana, anak-anak bagaimana. Jadi yang kita mau, bukan hanya bagaimana kereta gantung ini dapat menjawab persoalan (kesejahteraan) umum saja, tapi apakah mampu menjawab persoalan kaum marginal juga. Aman *ndak* hak-hak dasar mereka, terpenuhi gak hak-hak mereka. Itu yang paling penting dipastikan diawal karena mereka yang paling rentan dan akan terpengaruhi dari kebijakan pembangunan itu” (Wawancara pada Tanggal 13 November 2020 Via *Google Meeting*)

Diantara para perempuan tersebut, terdapat janda, orang-orang lanjut usia, orang tua tunggal, bahkan anak-anak. Terlebih, banyak dari perempuan lingkaran Rinjani yang merupakan mantan tenaga kerja wanita yang telah menemukan mata pencaharian tetap dari menjajakan kebutuhan pendakian. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh GEMA ALAM dapat kembali mendorong terjadinya gelombang meningkatnya tenaga kerja wanita besar-besaran yang kemudian mengharuskan perempuan-perempuan lingkaran Rinjani terpisah dari sanak saudara mereka dan rentan menerima perlakuan yang tidak sesuai di luar negeri.

Kemudian yang *kelima*, munculnya risiko konflik sosial atau friksi dari masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan. Risiko ini sendiri menurut GEMA ALAM sangat mungkin terjadi, sebab berkaca dari berbagai konflik *public-private partnership* dalam pengelolaan wilayah hutan dan sumber daya alam sebelumnya, masyarakat yang pro dan kontra seringkali rentan di *framing* pernyataannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan tersebut dan diadu domba dalam rangka memecah fokus publik terkait polemik pembangunan yang ada.

“....pemerintah dan perusahaan harus legowo dan tidak boleh *framing* pendapat masyarakat. Karena seperti pelajaran yang lalu-lalu kan sering sekali pendapat masyarakat didikotomikan antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju. Pola-pola lama seperti ini biasanya sering digunakan oleh korporasi untuk mengadu domba masyarakat dan jangan sampai hal ini terulang kembali. Kita tidak mau ada masyarakat yang difasilitasi ada yang tidak jangan sampai kaya gitu” (Wawancara dengan Muhammad Juaini pada Tanggal 13 November 2020 Via *Google Meeting*).

Hal inilah yang tidak diinginkan oleh GEMA ALAM, maka diperlukan adanya suatu *common ground* atau kesepakatan dari seluruh pihak melalui pembukaan



informasi pembangunan yang transparan. Kemudian yang *terakhir*, kebijakan pembangunan kereta gantung ini sendiri dinilai lebih berpihak pada pemodal atau investor daripada memprioritaskan urgensi dari persoalan kesejahteraan dan preservasi lingkungan di tingkat lokal yang hingga kini dinilai masih sangat carut-marut.

Apabila ditilik dari kacamata teori gerakan sosial baru, keenam fenomena yang mendorong GEMA ALAM untuk terlibat dalam mengadvokasi masyarakat dan lingkungan pada konflik pembangunan kereta gantung ini sejatinya sesuai dengan premis-premis yang dikemukakan oleh Rajendra Singh (2001:98-99) mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong terbentuknya konfigurasi gerakan sosial baru. Faktor-faktor yang dijelaskan oleh Singh tersebut yaitu: (1) *obsolete* atau hilangnya penegakan terhadap hak-hak asasi manusia akibat massifikasi pengaruh negara dan pasar; (2) kegagalan gerakan sosial lama dalam menjawab persoalan sosio-politik kontemporer seperti dalam hal persoalan kebijakan; (3) semakin kuatnya arus informasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang mereka miliki; (4) semakin meningkatnya pemahaman terhadap pluralitas dan keberagaman, serta; (5) demoralisasi dalam lingkup etik.

Dari penjabaran ini, maka dapat ditarik pemahaman bahwa konfigurasi gerakan sosial yang diaktualisasikan oleh GEMA ALAM mendudukan mereka sebagai gerakan yang tidak sama dengan gerakan-gerakan lainnya. Alih-alih mengklaim diri sebagai gerakan sosial yang fokus terhadap keberlangsungan lingkungan, GEMA ALAM turut memperhitungkan kesejahteraan masyarakat sebagai determinan utama yang pemenuhannya juga tidak boleh diacuhkan dan harus dilakukan secara selaras dengan upaya-upaya preservasi lingkungan itu sendiri.

Di sisi lain, Ketua GEMA ALAM, Haiziah Gazali turut menyatakan bahwa dalam polemik ini GEMA ALAM lebih mendudukan dirinya sebagai gerakan yang mengerahkan strategi yang bersifat *soft-power*. Secara teoritis, *soft-power* sendiri merupakan sebuah konsep yang menggunakan pendekatan aktor kenegaraan dalam praktiknya dan seringkali digunakan sebagai salah satu terminologi kekuasaan dalam kajian-kajian politik luar negeri (Nye 2004:x-xi). Dalam kajian tersebut, kekuasaan lunak atau *soft-power* diartikan sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan mengutamakan pendekatan-pendekatan non-koersif dan lebih mengutamakan cara-cara yang bersifat





persuasif guna menarik perhatian pihak lain untuk menyetujui agenda yang dimiliki (Nye 2004:x-xi).

Apabila dikontekstualisasikan dengan studi kasus penelitian ini, dimana kita tidak sedang berbicara subjek dan relasi antar-negara, dapat dipahami bahwa apa yang ingin disampaikan oleh ketua GEMA ALAM tersebut mengacu pada preferensi GEMA ALAM untuk mengaktualisasikan bentuk-bentuk gerakan yang lebih dominan bertumpu pada aktivitas persuasif dan mengandalkan kegiatan-kegiatan diskursif dalam rangka meningkatkan kesadaran semua pihak akan potensi-potensi kerusakan alam dan pelanggaran hak yang mungkin terjadi apabila pembangunan kereta gantung Rinjani ini tetap dilaksanakan dengan minimnya keterbukaan dari pemerintah dan pihak swasta.

### **Strategi, Peran, dan Proyeksi Pergerakan Gema Alam**

Terdapat setidaknya lima strategi utama yang dilakukan oleh GEMA ALAM dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat dan preservasi lingkungan pada konflik pembangunan Kereta Gantung Rinjani ini. Strategi-strategi tersebut yaitu:

- (1) membuka ruang-ruang publik dan wadah diskursif untuk mempertemukan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah masyarakat, pakar dan ahli lingkungan maupun ekonomi, pelaku dan penggiat usaha pariwisata, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pembangunan ini melalui mekanisme *public hearing* guna saling bertukar pendapat, gagasan, dan merumuskan solusi terkait konflik ini;
- (2) melakukan *digital public advocacy* melalui media sosial dan laman website resmi yang memiliki *traffic* kunjungan yang tergolong tinggi dan jumlah pengikut yang besar. Strategi ini kemudian menjadi cukup ampuh dalam menyebarkan narasi kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lingkaran Rinjani kepada khalayak luas yang tidak terkait langsung dengan agenda pembangunan ini guna mendulang dukungan dan simpati publik;
- (3) menjalin komunikasi dan membentuk jejaring advokasi dengan berbagai pihak seperti misalnya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja-PPS) dan



Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mengetahui secara langsung perkembangan informasi di lapangan;

(4) menjaring aspirasi dari masyarakat di berbagai kecamatan yang tersebar di 3 wilayah kabupaten yang menjadi wilayah administratif dari area lingkaran Rinjani untuk dijadikan sebagai bahan kajian sekaligus pertimbangan untuk menentukan strategi advokasi selanjutnya, dan;

(5) menerapkan strategi *bottom-up* melalui edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran, kedaulatan, dan resiliensi atas hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan kelima strategi yang diaktualisasikan tersebut, maka setidaknya terdapat empat peran strategis yang dimiliki oleh GEMA ALAM dalam upaya advokasi kepentingan masyarakat dan lingkungan pada konflik ini, yaitu: (1) Mediator yang menjembatani pertemuan antara masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini terjebak dalam kebuntuan arus informasi akibat minimnya ruang untuk berkomunikasi diantara keduanya; (2) Agregator dari pendapat publik yang beragam seperti aspirasi dari masyarakat, perspektif para ahli dan pakar, serta tokoh-tokoh lintas sektoral lain yang selama ini sukar untuk dikaji melalui satu kaca mata dan pemahaman yang sama; (3) Katalisator dalam distribusi dan massifikasi informasi yang dilakukan melalui media digital untuk menjaring dukungan publik, serta; (4) Edukator yang menguatkan kedaulatan masyarakat atas hak-hak mereka dan meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi konflik pembangunan ini.

Tujuan utama dari diterapkannya repertoar atau strategi ini sendiri dimaksudkan guna membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan mengenai agenda pembangunan yang ada. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pengagag GEMA ALAM yang menyatakan bahwa:

“Apa yang ingin dicapai dari upaya fasilitasi GEMA ALAM terhadap masyarakat sebenarnya adalah keterbukaan informasi, partisipasi aktif masyarakat, dan pemberian ruang yang memadai untuk mengemukakan keluhan kesah masyarakat sendiri. Jangan ada pemaksaan kehendak dan pengambilan keputusan sepihak karena konsekuensi dari pembangunan ini menyangkut dua aspek penting dari keberlangsungan hidup masyarakat, yaitu ruang-ruang hidup dan sumber kehidupan



masyarakat itu.....” (Wawancara dengan Muhammad Juaini pada Tanggal 13 November 2020 Via *Google Meeting*)

Pemanfaatan ruang publik dalam manuver gerakan sosial baru sendiri biasanya dapat ditemukan dalam berbagai kasus. Pada fenomena umum, gerakan sosial baru biasanya menggunakan ruang publik untuk mengembangkan atau memassifikasi suatu isu tertentu yang berkaitan dengan tuntutan mereka guna menarik perhatian masyarakat dan menambah basis dukungan (Sukmana 2016:121). Di sisi lain, pemanfaatan ruang publik oleh gerakan sosial baru tidak hanya berfokus pada manuver aktif untuk mempengaruhi pandangan publik, namun juga dapat dilihat dari bagaimana gerakan sosial baru membuka ruang-ruang negosiasi dengan berbagai pihak. Negosiasi ini misalnya dapat dilihat dari cara jaringan gerakan sosial baru mengembangkan isu serta melakukan kajian bersama di tataran internal jaringan gerakan terkait dengan tuntutan yang akan mereka sampaikan kepada otoritas terkait (Melucci dalam Gusfield et al. 1994:123).

Lebih jauh, strategi dan peran tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk repertoar gerakan sosial yang bersifat disruptif non-koersif. Konsep repertoar atau cetak biru gerakan yang bersifat disruptif sendiri menurut (Tarrow 2011:101-102) adalah suatu bentuk strategi gerakan yang dilakukan guna mempengaruhi persepsi publik melalui massifikasi informasi guna mendulang dukungan dan simpati terkait tuntutan yang tengah diperjuangkan. Sedangkan repertoar gerakan yang bersifat non-koersif sendiri mengacu pada bentuk strategi gerakan yang menghindari bentuk-bentuk aksi anarkisme dan mengedepankan model gerakan yang lebih persuasif, diskursif, dan negosiatif (Tarrow 2011:101-102). Strategi inilah yang kemudian ditonjolkan oleh GEMA ALAM sebagai sebuah gerakan sosial baru. Strategi ini pula yang memberikan aksentuasi khas bagi pergerakan dari GEMA ALAM, sebab tidak seperti gerakan-gerakan sosial pada umumnya, GEMA ALAM tidak pernah mendudukkan diri mereka sebagai pihak yang secara frontal selalu menolak agenda pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Melainkan lebih memosisikan diri sebagai pihak yang menekankan keterbukaan, keadilan, dan negosiasi guna mewujudkan pembangunan yang memang dapat menyejahterakan semua pihak dan menjamin kelestarian lingkungan.



Berdasarkan temuan empiric dari penelitian, dapat dipahami pula bahwa terdapat kesesuaian antara aspek-aspek yang diperjuangkan oleh GEMA ALAM dengan prinsip penggerak dari terbentuknya konfigurasi gerakan keadilan lingkungan kontemporer yang juga dapat ditemukan dalam repertoar akhir dari *The Second People of Color Environmental Leadership Summit* (Sandler dan Pezzulo 2007:327). Lebih jauh, komitmen untuk memperjuangkan keadilan lingkungan sejatinya dapat dilihat dalam sembilan prinsip dasar, yaitu: (1) tujuan (*purpose*) dari kerjasama antar gerakan yang berbasis pada prinsip kemitraan dan komitmen terkait inklusifitas; (2) nilai inti (*core values*) yang mengafirmasi keniscayaan dari keberagaman budaya di tingkat lokal guna mengedepankan bentuk gerakan yang terdesentralisasi; (3) membangun hubungan (*building relationship*) yang dilandaskan atas tanggung jawab, rasa hormat, dan rasa sepenanggungan guna mencapai sebuah harmoni; (4) menjawab keberagaman (*adressing differences*) dan mengakomodasi perbedaan yang selama ini tidak dapat disikapi dengan bijak sehingga menimbulkan penindasan dan opresi; (5) Kepemimpinan (*leadership*) pada jiwa, peran, dan eksistensi setiap individu di berbagai tataran untuk memperjuangkan tuntutan sesuai dengan keadaan yang mereka alami; (6) partisipasi (*participation*) pada setiap proses pergerakan guna memastikan konfigurasi gerakan yang sepenuhnya dilandaskan atas kondisi riil dari setiap anggota komunitas; (7) Menyelesaikan konflik (*resolving conflicts*) dengan mengedepankan diskusi-diskusi, pemahaman dan komunikasi berbasis interkultural guna menghasilkan suatu solusi terbaik; (8) Penggalangan dana (*fundraising*) dengan mekanisme donor yang bersifat *membership-due* dan menolak berbagai macam bentuk pendanaan dari organisasi kepentingan; (9) Akuntabilitas (*accountability*) yang dicerminkan oleh kesepakatan dan keterusterangan dari setiap pihak dalam membentuk agenda gerakan (Sandler dan Pezzulo 2007:327-331).

Strategi dan peran yang dimiliki oleh GEMA ALAM dalam menjembatani bertemunya berbagai pihak guna membangun kesepahaman ini bahkan diapresiasi oleh Kadis LHK Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarrom. Apresiasi ini dilontarkan menyusul keberhasilan pelaksanaan *public hearing* yang diinisiasi oleh GEMA ALAM dalam menelurkan berbagai rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan kelanjutan dari agenda pembangunan Kereta Gantung



Rinjani ini. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang turut hadir dalam *public hearing* tersebut bahkan berjanji untuk mengambil poin-poin kritis yang menjadi catatan hasil *hearing* dengan berbagai pihak lintas sektor untuk dirundingkan lebih jauh dan dipertimbangkan di tingkat pemda.

Keberhasilan GEMA ALAM membuka sumbatan-sumbatan komunikasi dan koordinasi diantara berbagai pihak ini membuktikan bahwa GEMA ALAM memiliki strategi pergerakan yang cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pihak pemda yang diwakili oleh Kadis LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat serta tokoh-tokoh lintas sektoral yang di undang dalam *public hearing* GEMA ALAM mengapresiasi langkah dalam membuka wadah pertukaran pikiran tersebut. Apresiasi yang dilontarkan oleh berbagai pihak ini juga menjadi salah satu tanda yang cukup baik bagi keberlangsungan gerakan GEMA ALAM kedepannya, sebab secara tidak langsung terdapat dukungan bagi idealisme pergerakan GEMA ALAM yang menekankan adanya transparansi, inklusivitas, dan partisipasi dari setiap pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada. Sehingga apabila terjadi eskalasi konflik kembali di masa yang akan datang, GEMA ALAM telah memiliki basis pendukung publik yang besar dan mampu menjadi titik tekan tersendiri bagi otoritas yang ada untuk mau mendengarkan tuntutan terkait penciptaan keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi dari gerakan sosial baru layaknya GEMA ALAM memiliki peran yang krusial dalam mewadahi suara-suara masyarakat yang tidak terdengar atau bahkan sengaja diacuhkan. Lebih daripada itu, gerakan sosial baru yang kemudian memiliki basis perjuangan keadilan lingkungan bahkan dapat kita pandang sebagai wadah yang tepat untuk menyemai perhatian yang lebih dalam kepada isu-isu ekologis dan preservasi lingkungan sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan hidup setiap orang tanpa terkecuali. Pergerakan dari GEMA ALAM yang secara sinergis memadukan tuntutan terkait dengan kesejahteraan sosial dan preservasi lingkungan menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat tercapai apabila



kelestarian dari lingkungan tidak menjadi prioritas utama dalam berbagai agenda pembangunan dan sebaliknya.

Lebih jauh, hal inilah yang kemudian mendorong GEMA ALAM yang merupakan gerakan sosial baru keadilan lingkungan terlibat dalam upaya advokasi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan pada polemik pembangunan Kereta Gantung Rinjani. Keterlibatan ini sendiri disebabkan oleh adanya dua penyebab, yaitu penyebab yang sifatnya filosofis dan praktis. Secara filosofis keterlibatan GEMA ALAM dalam polemik ini disebabkan oleh dorongan internal dari gerakan ini untuk membela masyarakat yang mereka klaim sebagai bagian dari jati diri gerakan yang tidak terpisahkan. Kemudian, secara praktikal, keterlibatan dari GEMA ALAM dalam polemik ini disebabkan oleh berbagai fenomena penyelewengan hak-hak sipil yang dimiliki oleh masyarakat seperti misalnya pengambilan kebijakan yang non-partisipatif, rusaknya ruang-ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat, potensi dampak ekonomi yang merugikan, diabaikannya prinsip-prinsip kesetaraan gender, bias kebijakan yang lebih berpihak kepada investor, dan adanya risiko gesekan sosial diantara masyarakat.

Dalam menjawab persoalan-persoalan ini, GEMA ALAM menerapkan strategi pergerakan yang bersifat diskursif non-koersif, dimana manuver pergerakan lebih dimaksudkan untuk mempengaruhi opini publik melalui massifikasi informasi dan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat diskursif. Diantara beberapa strategi pergerakan yang diaktualisasikan oleh GEMA ALAM adalah melakukan *public hearing* guna menjembatani bertemunya berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan ini, melakukan advokasi digital untuk mendulang dukungan publik, menjaring komunikasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki perhatian terhadap isu ini, menghimpun aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dan penentu strategi gerakan, serta mengedukasi masyarakat terkait hak-hak mereka. Strategi-strategi ini pun mendudukkan GEMA ALAM sebagai mediator, agregator, katalisator, dan edukator dalam upaya advokasi kepentingan masyarakat dan lingkungan pada konflik ini. Strategi pergerakan yang diaktualisasikan oleh GEMA ALAM ini sendiri terbukti efektif menyusul besarnya apresiasi publik yang dilayangkan atas upaya GEMA ALAM dalam mengusahakan terciptanya kesepakatan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ini.



## Daftar Pustaka

- Allen, Kim, Vinci Daro, dan Dorothy C. Holland. 2007. "Becoming an Environmental Justice Activist" dalam Ronald Sandler dan Phaedra C. Pezzulo (ed). *Environmental Justice and Environmentalism: The Social Justice Challenge to The Environmental Movement*. Cambridge: MIT Press.
- Biro Adpim Nusa Tenggara Barat. 2022. *Gubernur NTB Lakukan Peletakan Batu Pertama Kereta Gantung Rinjani*. Diakses pada 11 Juli 2023 secara daring melalui portal resmi <https://biroadpim.ntbprov.go.id/gubernur-ntb-lakukan-peletakan-batu-pertama-kereta-gantung-rinjani/>
- DISLHK Nusa Tenggara Barat. *Tugas dan Fungsi*. Diakses pada 11 Juli 2023 secara daring melalui portal resmi <https://dislkh.ntbprov.go.id/tugas-dan-fungsi/>
- DPM PTSP Nusa Tenggara Barat. 2017. *Suhaili Ngotot Buat Kereta Gantung Rinjani Pemkab Loteng Gandeng Investor Tiongkok*. Diakses pada 11 Juli 2023 secara daring melalui portal resmi <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2017/07/02/1161/>
- DPM PTSP Nusa Tenggara Barat. 2023. *H. Rum Pastikan Pembangunan Kereta Gantung Rinjani Dapat Terealisasi Tanpa Hambatan*. Diakses pada 11 Juli 2023 secara daring melalui portal resmi <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2023/05/17/h-rum-pastikan-pembangunan-kereta-gantung-rinjani-dapat-teralisasi-tanpa-hambatan/>
- GEMA ALAM. 2020. *Pro dan Kontra Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani*. Diakses pada 11 Juli 2023 secara daring melalui portal resmi <https://gemaalamntb.org/pro-dan-kontra-rencana-pembangunan-kereta-gantung-rinjani/>
- Gusfield, Joseph R., Enrique Larana, dan Hank Johnston. 1994. *New Social Movements: From Ideology to Identity*. Philadelphia: Temple University Press.
- Liputan6.com. 2017. *Gubernur NTB Tolak Pembangunan Kereta Gantung di Gunung Rinjani*. Diakses pada 28 Januari 2020 secara daring melalui portal berita online <https://www.liputan6.com/regional/read/3020086/gubernur-ntb-tolak-pembangunan-kereta-gantung-di-gunung-rinjani>
- Nye, Joseph S. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Roberts, J. Timmons. 2007. "Globalizing Environmental Justice" dalam Ronald Sandler dan Phaedra C. Pezzulo (ed). *Environmental Justice and Environmentalism: The Social Justice Challenge to The Environmental Movement*. Cambridge: MIT Press.
- Sandler, Ronald dan Phaedra C. Pezzulo. 2007. *Environmental Justice and Environmentalism: The Social Justice Challenge to The Environmental Movement*. Cambridge: MIT Press.
- Schlosberg, David. 2007. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.



- Singh, R. 2001. *Social Movement, Old & New: A Post Modernist Critiques*. New Delhi: SAGE Pub. India, Limited.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Syarifudin, Ahmad *et al.* 2011. *Rinjani Terluka! Jejak Pergulatan Mengembalikan Makna*. Mataram: Santiri Foundation.
- Tarrow, Sidney. 2011. *Power in Movements: Social Movements and Contentious Politics (3<sup>rd</sup> Edition)*. New York: Cambridge University Press.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2020. *Menolak Eksploitasi Alam Rinjani untuk Investasi yang Mengatasnamakan Kesejahteraan*. Diakses pada 11 Juli 2023 secara daring melalui portal resmi <https://www.walhi.or.id/menolak-eksploitasi-alam-rinjani-untuk-investasi-yang-mengatasnamakan-kesejahteraan>